

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN AKIBAT MALPRAKTIK MEDIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)

Aris Yudhariansyah *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum***

Tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana malpraktik menurut hukum pidana, bagaimana tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap tindakan malpraktik, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik..

Kesimpulan dari pembahasan adalah menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Malpraktik, Medis

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF HEALTH
PERSONNEL DUE TO MEDICAL MALPRACTICE LEGAL
PERSPECTIVE NUMBER 36 OF 2009
CONCERNING HEALTH
(Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 2033 K/Pid.Sus/2017)**

Aris Yudhariansyah*
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum***

Health workers who carry out health service activities are required to have a practice permit from the government in accordance with applicable regulations, and when providing health services they must be in accordance with medical competence. The formulation of the problem in this thesis is how the criminal act of malpractice is regulated according to criminal law, what is the responsibility of health workers for acts of malpractice, what are the legal considerations of judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2033 K/Pid.Sus/2017.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

The legal regulation of medical malpractice in treating patients viewed from the perspective of health law is regulated in Article 78 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice that every person deliberately uses tools, methods or other means of providing services to the public that give the impression that they are If the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist registration certificate or practice permit.

The conclusion of the discussion is that according to health law in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2033 K/Pid.Sus/2017, it is based on the consideration that in the defendant there were no unlawful and unlawful acts found, which must be judged from the deliberateness or intention of the unlawful nature of an act. the person of the perpetrator so that the element intentionally uses tools, methods or other means of providing services to the public which give the impression as if the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist's registration certificate or practice permit.

Keywords: Liability, Malpractice, Medical.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

KATA PENGANTAR